

Model Pengorganisasian Kurikulum Pendidikan Pancasila Jenjang Sekolah Menengah Atas Provinsi Jawa Tengah

Ahmad Nasir Ari Bowo¹, Joko Wahono², Paiman³, Anastasia Esawati⁴

^{1,2,3,4}Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

Email: ahmadnasir.ucy@gmail.com

Abstrak

Permasalahan pengorganisasian kurikulum di SMA khususnya mata pelajaran Pendidikan Pancasila adalah kurangnya pemahaman kepala sekolah terkait penyusunan pengorganisasian kurikulum mata pelajaran. Hal tersebut berdampak kurangnya kemampuan membimbing guru mata pelajaran dalam menyusun dan pelaksanaan pengorganisasian kurikulum mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Penelitian ini bertujuan menggambarkan dan menemukan pengorganisasian kurikulum Pendidikan Pancasila Sekolah Menengah Atas Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis studi kasus ganda eksploratori. Subjek penelitian adalah kepala sekolah atau wakil kepala sekolah bidang kurikulum, guru dan peserta didik di SMA Negeri 1 Klaten, SMA Negeri 2 Sukoharjo, dan SMA Negeri 1 Surakarta. Data penelitian melalui wawancara, observasi, dan dokumen. Teknik analisis data menggunakan model alir Miles & Huberman. Keabsahan data melalui triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengorganisasian kurikulum Pendidikan Pancasila di SMA antara lain: (1) penentuan tim oleh kepala sekolah; (2) pembuatan jadwal; (3) pembagian tugas; (4) penentuan sumber daya; dan (5) sinergitas antara komponen. Pelaksana utama adalah guru Pendidikan Pancasila.

Kata kunci: Pengorganisasian Kurikulum, Pendidikan Pancasila, SMA

Abstract

The problem with organizing the curriculum in high school, especially in the Pancasila Education subjects, is the lack of understanding by the principal regarding the preparation of the subject curriculum organization. This has an impact on the lack of ability to guide subject teachers in compiling and implementing the organization of the Civics curriculum. This study aims to describe and discover the organization of the curriculum for Pancasila Education and Middle School Citizenship within the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology of Central Java Province. This study uses a qualitative approach with a double exploratory case study type. The research subjects were school principals or deputy principals for curriculum, teachers, and students at SMA Negeri 1 Klaten, SMA Negeri 2 Sukoharjo, and SMA Negeri 1 Surakarta. Research data through interviews, observations, and documents. The data analysis technique uses the Miles & Huberman flow model. Data validity through triangulation. The results of the research show that organizing includes: (1) the determination of the team by the school principal; (2) schedule preparation; (3) the division of tasks; (4) the determination of resources; and (5) synergy between components. The main executor is the Pancasila Education teacher.

Keywords: Curriculum organization, Pancasila Education, Senior High Schools

PENDAHULUAN

Kurikulum merupakan seperangkat pengetahuan yang terdiri dari berbagai komponen meliputi tujuan, bahan materi, dan pedoman yang akan digunakan dalam proses pembelajaran

(Ulinniam dkk., 2021). Kurikulum berisi seperangkat aturan dan pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diharapkan (Hidayati, 2021). Hal yang hampir sama juga disampaikan oleh Stabback (2016) bahwa kurikulum menjelaskan atau berisi instruksi tentang bagaimana cara guru melaksanakan pembelajaran termasuk juga penilaian. Kurikulum berisi tentang pengetahuan, ketrampilan, perilaku, dan proses pelaksanaan pembelajaran (Wallis; 2015).

Kurikulum mempunyai fungsi penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan. Sebagaimana disampaikan Syarifah (2019) fungsi kurikulum antara lain menambah pengalaman baru bagi peserta didik yang dapat dikembangkan dalam mewujudkan tujuan, sebagai pedoman kerja bagi guru dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan evaluasi pembelajaran, sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi bagi pengawas, sebagai panduan bagi orang tua dalam membimbing anaknya, dan bagi masyarakat maupun pengguna dijadikan sebagai bahan masukan dalam penerapan kurikulum disekolah. Kurikulum haruslah mampu mendeskripsikan klasifikasi pengetahuan yang akan diterapkan. Selain itu, kurikulum juga harus mampu memprediksi, menjelaskan dan panduan bagi pelaksana pendidikan (Hunkins; 2015).

Diperlukan pengelolaan kurikulum yang baik agar tercapai tujuan yang diharapkan. salah satu komponen penting dalam pengelolaan kurikulum adalah aspek pengorganisasian kurikulum. Pengorganisasian kurikulum adalah komponen atau struktur kurikulum yang diterapkan dalam pembelajaran. Pengorganisasian kurikulum merupakan pola bahan pelajaran yang disusun dan disampaikan kepada peserta didik. Pengorganisasian kurikulum berkaitan tentang penentuan bahan pelajaran, urutan cara penyajian, dan proses penyampainnya kepada peserta didik (Utomo dkk., 2018). Tujuan kurikulum dan pembelajaran serta pendidikan dapat tercapai secara maksimal apabila salah satu komponen pengelolaan kurikulum diantaranya aspek pengorganisasiannya terlaksana dengan baik.

Kurikulum meliputi berbagai mata pelajaran, diantaranya adalah mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Karakteristik kurikulum Pendidikan Pancasila adalah pengembangan, pelestarian nilai luhur dan moral yang diwujudkan dalam bentuk perilaku sehingga memiliki rasa kebangsaan, cinta tanah air, demokratis, dan nilai-nilai karakter yang berlandaskan Pancasila (Saputri; 2021). Pendidikan Pancasila menekankan pada aspek pengetahuan, berfikir kritis, komunikasi, kerjasama, dan kemampuan menyelesaikan permasalahan (Murdiono dan Wuryandani, 2021). Pendidikan Pancasila wajib diberikan disetiap jenjang sekolah. Pendidikan Pancasila merupakan mata pelajaran wajib pada pendidikan dasar dan menengah

(Kemdikbud 2003). Hal itu menunjukkan bahwa Pendidikan Pancasila memiliki peranan yang penting dan strategis untuk mewujudkan tujuan negara.

Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan bertujuan menghasilkan warganegara yang paham informasi, komitmen dan aktif berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, otonom dan kritis serta bermoral (Pike, 2006; David, Lee, 2008). Tujuan Pendidikan Pancasila sebagaimana disampaikan oleh Winataputra (2016) adalah agar peserta didik memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan moral Pancasila, nilai dan norma Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945, nilai dan komitmen *Bhinneka Tunggal Ika*, serta komitmen bernegara kesatuan Republik Indonesia.

Nuryadi dan Tolib (2017) mengungkapkan bahwa secara umum tujuan Pendidikan Pancasila pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah adalah mengembangkan potensi peserta didik dalam seluruh dimensi kewarganegaraan, yaitu: (1) sikap kewarganegaraan termasuk keteguhan, komitmen dan tanggung jawab kewarganegaraan; (2) pengetahuan kewarganegaraan; dan (3) keterampilan kewarganegaraan termasuk kecakapan dan partisipasi kewarganegaraan.

Salah satu komponen yang mempengaruhi keberhasilan tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah aspek pengorganisasian kurikulum Pendidikan Pancasila di sekolah. Pengorganisasian kurikulum Pendidikan Pancasila belum sepenuhnya memenuhi persyaratan dan tujuan yang diharapkan. Hasil penelitian Rusnaeni, dan Umar (2018) menunjukkan bahwa: (1) pengorganisasian kurikulum Pendidikan Pancasila belum berjalan secara efektif disebabkan karena sebagian guru belum menguasai aspek pengorganisasian kurikulum meliputi komponen silabus, kompetensi inti, kompetensi dasar, program tahunan, program semester, indikator pencapaian kompetensi, metode pembelajaran, strategi pembelajaran, pendekatan pembelajaran dan penilaian hasil belajar; (2) hambatan yang dihadapi dalam pengorganisasian kurikulum Pendidikan Pancasila meliputi: (a) sekolah, khususnya guru kurang mengikuti pelatihan seperti yang diselenggarakan oleh musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) tingkat kabupaten atau kota, dan lainnya; (b) minimnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kurikulum Pendidikan Pancasila seperti buku pegangan baik guru maupun peserta didik dan kurangnya fasilitas di sekolah yang menjadi salah satu faktor penghambat proses pengorganisasian kurikulum Pendidikan Pancasila.

Penelitian Supriana, (2020) mengungkapkan bahwa pengelolaan kurikulum Pendidikan Pancasila di beberapa sekolah belum terlaksana dengan baik karena faktor guru yang belum memahami komponen pengorganisasian kurikulum Pendidikan Pancasila,

keterbatasan dukungan sarana belajar, kesiapan peserta didik, dan dukungan masyarakat yang terbatas. Muthiah, dkk., (2021) menyampaikan bahwa pada aspek pengorganisasian kurikulum mata pelajaran, guru dan organisasi guru masih belum terkoordinir dengan baik di beberapa sekolah. Diperlukan komitmen dan komunikasi yang efektif dalam pengorganisasian kurikulum mata pelajaran. Khususnya komunikasi yang efektif dan sinergitas antara guru, kepala sekolah, organisasi guru dan masyarakat. Sebagian guru belum memahami komponen sistem kurikulum secara mendalam (Isa dkk., 2021). Diperlukan pedoman bagi guru dalam pengorganisasian kurikulum serta pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran berkelanjutan.

Hasil *grand tour* peneliti di tiga SMA Negeri Kabupaten Klaten, Sukoharjo dan Surakarta dapat diketahui bahwa sekolah mengalami kesulitan khususnya dalam proses pelaksanaan pengorganisasian kurikulum Pendidikan Pancasila. Hal tersebut disebabkan karena guru Pendidikan Pancasila belum begitu menguasai komponen kurikulum. Di setiap sekolah mempunyai kesiapan dan kemampuan yang berbeda-beda dalam pelaksanaan pengorganisasian kurikulum mata pelajaran. Tidak semua kepala sekolah mampu melakukan bimbingan kepada guru mata pelajaran terkait pelaksanaan pengorganisasian kurikulum mata pelajaran dengan baik.

Kurangnya pemahaman kepala sekolah terkait penyusunan pengorganisasian kurikulum mata pelajaran. Hal tersebut berdampak kurangnya kemampuan membimbing guru mata pelajaran dalam menyusun / pelaksanaan pengorganisasian kurikulum mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Rata-rata di sekolah Negeri, masing-masing kepala sekolah sudah mendapatkan pelatihan manajemen kurikulum termasuk aspek pengorganisasiannya. Akan tetapi, pelatihan manajemen kurikulum dirasa kurang maksimal. Terlebih di sekolah swasta, tidak semua kepala sekolah mengikuti pelatihan kurikulum. Kepala sekolah, memiliki peluang besar dalam mengembangkan guru mata pelajaran untuk mencapai tuntutan pendidikan (Duze; 2012).

Berdasarkan permasalahan pelaksanaan pengorganisasian kurikulum Pendidikan Pancasila sebagaimana dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, maka diperlukan penelitian yang mampu menggambarkan dan menemukan model pengorganisasian kurikulum Pendidikan Pancasila. Peneliti melakukan penelitian secara mendalam tentang “model pengorganisasian kurikulum Pendidikan Pancasila jenjang Pendidikan Menengah (SMA) di lingkungan Kemdikbud Provinsi Jawa Tengah (Studi pada tiga SMA di Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo dan Kota Surakarta).” Penelitian ini menekankan pada level sekolah yaitu kepala

sekolah/wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan level kelas oleh guru Pendidikan Pancasila. Penelitian ini bertujuan menggambarkan dan menemukan model pengorganisasian kurikulum PPKn jenjang Pendidikan Menengah (SMA) Provinsi Jawa Tengah.

Model pengorganisasian kurikulum Pendidikan Pancasila merupakan aspek penting dalam pengelolaan kurikulum Pendidikan Pancasila. Rusman, (2012) mengungkapkan bahwa model pengorganisasian kurikulum merupakan pola atau desain bahan kurikulum yang tujuannya untuk mempermudah peserta didik dalam mempelajari bahan pelajaran serta melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan pembelajaran dicapai secara efektif. Organisasi kurikulum sangat terkait dengan pengaturan bahan pelajaran yang ada dalam kurikulum. Sumber bahan pelajaran dalam kurikulum adalah nilai budaya, nilai sosial, aspek peserta didik dan masyarakat, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam organisasi kurikulum antara lain: ruang lingkup, urutan bahan, kontinuitas, keseimbangan, dan keterpaduan.

Model Pengorganisasian kurikulum merupakan kegiatan mengorganisir antara komponen dan pelaksana kurikulum agar dapat bekerja sama secara efektif dan efisien. Secara akademik atau kurikulum, organisasi kurikulum dikembangkan dalam bentuk: (a) kurikulum mata pelajaran; (b) kurikulum bidang studi; (c) kurikulum integrasi; (d) kurikulum yang disusun sesuai kebutuhan peserta didik. Terdapat beberapa prinsip yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan pengorganisasian kurikulum. Beberapa pertimbangan tersebut meliputi: (a) ruang lingkup; (b) urutan bahan; (c) keterpaduan, keseimbangan dan kontinuitas. Setiap pola kurikulum memiliki ruang lingkup materi pembelajaran yang berbeda (Hidayati, 2021). Syaputra dan Hasanah (2021) aspek pengorganisasian dilakukan secara kolaboratif, pengaturan bahan pelajaran yang ada pada kurikulum, menyiapkan fasilitas, mendesain pembelajaran sesuai alokasi waktu, rekayasa kurikulum agar pembelajaran terlaksana secara efektif, menyusun mata pelajaran dan sumber belajar, penyesuaian kondisi lingkungan, dan menganalisis program kegiatan.

Berpedoman pada Hidayati, (2021) Pengorganisasian kurikulum Pendidikan Pancasila sekolah. Berpedoman pada English & Larson, Rogan & Aldous, Hidayati (2021) tahapan kegiatan pengorganisasian kurikulum meliputi penentuan tim perencanaan kurikulum, jadwal kegiatan, pembagian tugas, penentuan sumber daya, dan sinergitas perencanaan kurikulum. pada tahap pengorganisasian kurikulum Pendidikan Pancasila juga meliputi keterkaitan antara komponen materi, standar kompetensi, kompetensi dasar, silabus dan juga komponen rencana pelaksanaan pembelajaran. Agar manajemen kurikulum Pendidikan Pancasila terlaksana

dengan baik maka diperlukan komponen-komponen yang lainnya sebagaimana disampaikan oleh Rogan & Aldous 2005, Colyns dkk., (2017). Adapun komponen pendukung yang lainnya yaitu: (1) kapasitas sekolah untuk mendukung implementasi meliputi etos manajemen sekolah dan sumber daya fisik; (2) dukungan eksternal meliputi pengembangan profesional, sumber daya fisik, dan monitoring. Apabila komponen-komponen tersebut dapat terlaksana dengan baik maka tercapai tujuan Pendidikan Pancasila.

Penelitian ini bermanfaat khususnya bagi Guru Pendidikan Pancasila, pengelola sekolah, masyarakat dan peserta didik. Manfaat penelitian ini antara lain: (1) menambah khasanah teoritis tentang pengorganisasian kurikulum PPKn; (2) panduan bagi guru dan pihak sekolah dalam pengorganisasian kurikulum Pendidikan Pancasila; (3) peningkatan mutu sekolah, dan;(4) sebagai acuan atau pedoman untuk penelitian berikutnya yang sejenis.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis studi kasus ganda. Studi kasus sebagai suatu eksplorasi dari sistem atau kasus yang terkait (Conny., 2010). Studi kasus dapat digunakan pada masyarakat, kelompok, maupun lembaga atau instansi dapat berupa peristiwa, kegiatan, program, dan kelompok pada suatu kondisi tertentu. Pendekatan penelitian kualitatif melalui jenis studi kasus digunakan dengan harapan dapat memahami makna pemikiran subjek yang diteliti. Penelitian ini dilakukan pada jenjang pendidikan menengah di lingkungan Kemdikbud yaitu Provinsi Jawa Tengah. Lokasi yaitu SMA Negeri 1 Klaten, SMA Negeri 2 dan SMA Negeri 1 Surakarta. Penelitian ini berfokus pada pengorganisasian kurikulum mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan.

Sumber data penelitian yang menjadi *key informan* adalah Kepala Sekolah/Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Informan utama dalam penelitian ini adalah guru Pendidikan Pancasila. Sumber data pendukung yang lain melalui wawancara, observasi atau pengamatan penelitian, dan studi dokumentasi di masing-masing sekolah. Adapun sumber data pendukung lain yang relevan yaitu wawancara dengan peserta didik. Selain itu juga hasil pengamatan atau observasi peneliti dan dokumentasi peneliti terkait dokumen kurikulum di masing-masing sekolah tempat penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara terstruktur secara mendalam, observasi non partisipatif, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini berpedoman pada teknik analisis data kualitatif model interaktif Miles & Huberman. Analisis data dilakukan pada kasus pertama terlebih dahulu dan

dilanjutkan pada kasus-kasus berikutnya pada level daerah. Selanjutnya dibandingkan masing-masing kasus tersebut yang meliputi persamaan dan perbedaan sehingga didapatkan gambaran dan temuan akhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi hasil penelitian pengorganisasian kurikulum Pendidikan Pancasila baik di SMA Negeri 1 Klaten, SMA Negeri 1 Sukoharjo, dan SMA Negeri 1 Surakarta, secara umum teknis pengorganisasian kurikulum Pendidikan Pancasila memiliki ciri khas atau perbedaan masing-masing. Namun demikian, secara umum memiliki pola yang sama. Hal tersebut disebabkan karena kurikulum Pendidikan Pancasila yang digunakan dimasing-masing sekolah sama-sama berpedoman pada kurikulum nasional. Adapun deskripsi hasil penelitian pengorganisasian kurikulum Pendidikan Pancasila secara rinci sebagaimana dipaparkan dalam uraian berikut.

Pertama, proses penentuan tim perencanaan kurikulum Pendidikan Pancasila. hasil penelitian menunjukkan baik di SMA masing-masing daerah sama-sama menggunakan kurikulum Kemdikbud, sehingga hasil penelitiannya pun didapatkan hasil yang sama. Kepala sekolah memiliki kewenangan didalam menentukan tim perencanaan kurikulum semua mata pelajaran termasuk Pendidikan Pancasila. Adapun proses penentuan tim perencanaan implementasi kurikulum Pendidikan Pancasila yaitu kepala sekolah dibantu wakil kepala sekolah membagikan jadwal mengajar dan memberikan tugas kepada guru Pendidikan Pancasila untuk menyusun perencanaan implementasi kurikulum Pendidikan Pancasila sesuai jadwal mengajar. Selanjutnya guru Pendidikan Pancasila menyusun rencana implementasi kurikulum Pendidikan Pancasila sesuai jadwal mengajar atau kelas yang diampu. Didalam proses penyusunannya, guru Pendidikan Pancasila juga kolaborasi atau bekerjasama dengan guru yang lain baik di Sekolah maupun daerah melalui forum musyawarah guru Pendidikan Pancasila. Meskipun penyusunannya dilakukan oleh masing-masing guru. Selanjutnya apabila sudah selesai, guru mengumpulkannya kepada Kepala Sekolah untuk dikoreksi terlebih dahulu sebelum dilakukan penandatanganan atau pengesahan dokumen perencanaan implementasi kurikulum Pendidikan Pancasila tersebut.

Kedua, proses pembuatan jadwal perencanaan implementasi kurikulum Pendidikan Pancasila. Adapun tahapannya meliputi: (1) kepala sekolah, wakil Kepala Sekolah membuat kalender akademik atau pendidikan dengan berpedoman pada kalender pendidikan yang diterbitkan oleh dinas pendidikan provinsi. Kalender pendidikan yang dibuat oleh dinas

pendidikan provinsi berpedoman pada kalender pendidikan nasional; (2) kepala sekolah mengagendakan rapat persiapan perencanaan implementasi kurikulum dengan mengundang semua guru mata pelajaran; (3) kepala sekolah mensosialisasikan kalender pendidikan Sekolah dan membagikan jadwal mengajar masing-masing guru tanpa terkecuali guru Pendidikan Pancasila; (4) kepala sekolah memberikan tugas kepada masing-masing guru untuk membuat perencanaan implementasi kurikulum dan deadline pengumpulannya, yaitu di awal semester ganjil; (4) guru Pendidikan Pancasila menyusun komponen perencanaan implementasi kurikulum Pendidikan Pancasila sesuai deadline yang sudah ditentukan. Adapun komponen yang dibuat secara umum meliputi: (a) program tahunan; (b) program semester; (c) silabus; (d) rencana pelaksanaan pembelajaran; (5) guru Pendidikan Pancasila mempunyai kewenangan penuh didalam menyusun komponen perencanaan implementasi kurikulum Pendidikan Pancasila. Dalam penyusunannya Guru Pendidikan Pancasila juga berdiskusi dengan masing-masing pihak antara lain guru Sekolah, tim MGMP regional dan juga Kepala Sekolah atau wakil Kepala Sekolah khususnya bidang kurikulum.

Ketiga, proses pembagian tugas perencanaan implementasi kurikulum Pendidikan Pancasila. Pembagian tugas perencanaan implementasi kurikulum Pendidikan Pancasila ditentukan oleh Kepala Sekolah dalam bentuk matrik jadwal mengajar guru Pendidikan Pancasila. Di masing-masing Sekolah yang di teliti rata-rata terdapat dua sampai dengan tiga guru Pendidikan Pancasila. Sehingga masing-masing guru membuat perencanaan implementasi kurikulum di masing-masing kelas. Adapun proses nya adalah pertama pihak Sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah mengagendakan rapat membahas perencanaan implementasi kurikulum diantaranya adalah pembagian tugas mengajar guru. kedua, guru Pendidikan Pancasila menyusun perencanaan implementasi kurikulum sesuai jadwal yang sudah diberikan oleh guru yaitu sesuai kelas yang diampu.

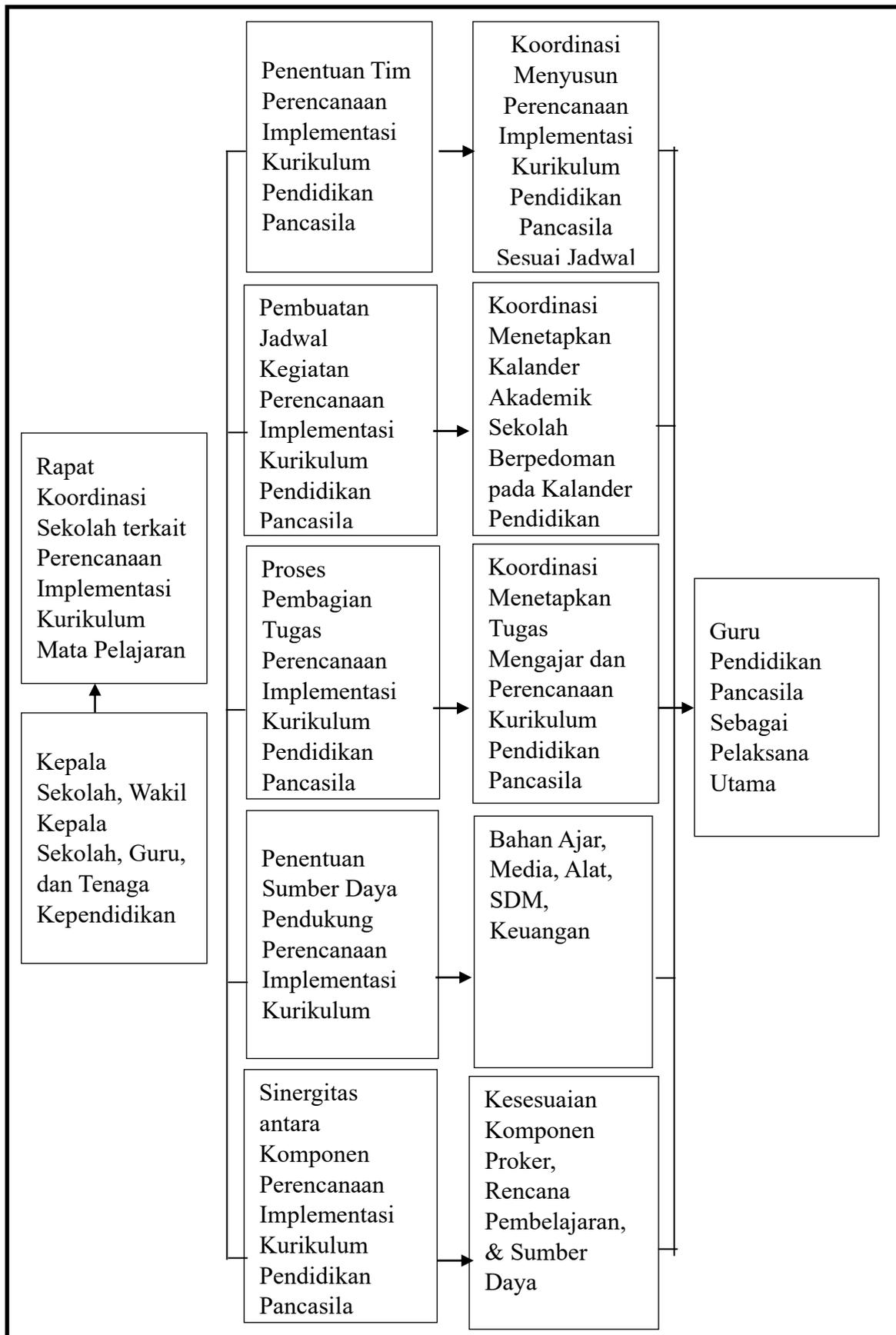
Keempat, proses penentuan sumber daya pendukung perencanaan kurikulum Pendidikan Pancasila. Adapun temuan penelitian nya yaitu bahwa proses penentuan sumber daya pendukung perencanaan implementasi kurikulum khususnya mata pelajaran Pendidikan Pancasila terdiri dari beberapa tahapan. Pertama, Kepala Sekolah khususnya sebagai pimpinan sekolah di awal semester mengadakan rapat dengan guru membahas berbagai perencanaan terkait kurikulum mata pelajaran. pembahasan tersebut antara lain berkaitan tentang sumber daya yang diperlukan dalam perencanaan implementasi kurikulum. Kedua, para guru memberi masukan kepada Kepala Sekolah terkait berbagai komponen sumber daya yang dibutuhkan dalam perencanaan implementasi kurikulum mata pelajaran. Ketiga, Kepala

Sekolah mempertimbangkan berbagai masukan guru, selanjutnya menindaklanjutinya dalam bentuk kebijakan. Adapun sumber daya pendukung dalam perencanaan implementasi kurikulum Pendidikan Pancasila secara umum meliputi sarana antara lain buku ajar, media, alat tulis dan sarana yang lainnya. guru juga koordinasi dengan para wali murid khususnya membahas perkembangan peserta didiknya. Dalam melakukan pengadaan sarana khususnya, Kepala Sekolah melakukan koordinasi dengan bagian keuangan Sekolah.

Kelima, sinergitas antara komponen perencanaan implementasi kurikulum Pendidikan Pancasila. Hasil temuan lapangan tentang proses sinergitas antara komponen perencanaan implementasi kurikulum Pendidikan Pancasila baik di SMA dapat diketahui bahwa tahapan proses sinergitas antara komponen perencanaan implementasi kurikulum PPKn meliputi: (1) Guru Pendidikan Pancasila didalam menyusun komponen perencanaan implementasi kurikulum terlebih dahulu menyusun komponen dasar atau umum terlebih dahulu. Adapun komponen yang disusun adalah program kerja. Program kerja terdiri dari program tahunan, program semester, silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran dan rencana penilaian. Dalam menyusun komponen program kerja guru berpedoman pada SKL, KI, KD kurikulum nasional dan kalender akademik. (2) Dalam menyusun rencana implementasi kurikulum guru Pendidikan Pancasila juga melakukan kolaborasi dengan guru lain baik di Sekolah maupun tingkat daerah dan juga masyarakat atau wali murid.

Guru Pendidikan Pancasila juga berdiskusi dengan pihak sekolah terkait sarana dan prasarana apa saja yang digunakan dalam rencana implementasi kurikulum Pendidikan Pancasila. Selanjutnya kepala sekolah menindaklanjuti dan menyusun anggaran untuk pengadaan sarana atau fasilitas khususnya perangkat kurikulum dan pembelajaran. Dari berbagai komponen diatas meliputi program kerja, pihak sekolah, wali murid atau masyarakat, sarana dan prasarana serta pendanaan pengadaan sarana dapat diketahui bahwa saling bersinergis yaitu saling melengkapi dan berkaitan.

Berdasarkan uraian deskripsi hasil penelitian sebagaimana dipaparkan di atas, selanjutnya temuan penelitian sebagaimana dipaparkan pada gambar berikut.



Gambar 1. Model Pengorganisasian Kurikulum Pendidikan Pancasila SMA

Hasil temuan penelitian tentang model pengorganisasian kurikulum Pancasila SMA sebagaimana gambar 1 di atas menunjukkan bahwa:

Pada tahap pengorganisasian kurikulum, pembagian tugas dan pengaturan jadwal kelas ditentukan oleh kepala sekolah dibantu oleh wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Guru Pendidikan Pancasila tinggal mengikuti instruksi dari kepala sekolah terkait penyusunan kurikulum. Hal tersebut lebih memudahkan guru Pendidikan Pancasila dalam teknis penyusunannya. Sebagaimana disampaikan oleh Nisbi, (2017) bahwa penanggung jawab pembagian tugas dalam perencanaan kurikulum adalah kepala sekolah. Teknis pelaksanaannya bisa dilakukan oleh wakil kepala sekolah. Hidayati (2021) juga menyampaikan bahwa aspek pengorganisasian kurikulum diantaranya adalah tahapan pembagian tugas. Selanjutnya pelaksana pembagian tugas tingkat kelas dan mata pelajaran adalah guru.

Teknis pengorganisasian kurikulum Pendidikan Pancasila pada tingkat kelas adalah guru Pendidikan Pancasila. Pada tahapan ini, sebagian besar guru Pendidikan Pancasila menyusun komponen tahapan kurikulum sendiri tanpa melibatkan secara penuh guru yang lain baik ditingkat sekolah atau MGMP dan juga wali murid. Pelibatan guru yang lain baik ditingkat sekolah atau MGMP dan juga wali murid hanya sebatas dukungan secara umum, sehingga hal tersebut berdampak pada kurang maksimalnya dalam pengorganisasian kurikulum Pendidikan Pancasila. Padahal manajemen kurikulum Pendidikan Pancasila yang baik harus memerlukan tim yang baik. Pada tahapan ini kepala sekolah tidak membentuk tim khusus dalam manajemen kurikulum Pendidikan Pancasila. Amirudin, (2017) mengungkapkan bahwa manajemen sekolah, guru, masyarakat, organisasi profesi, dan pemerintah, merupakan tim dalam perencanaan kurikulum Pendidikan Pancasila. Sekolah mempunyai peran yang penting dalam penentuan tim perencanaan kurikulum Pendidikan Pancasila. Hal yang sama juga disampaikan oleh Rusman (2012) bahwa sumber daya pendukung sangat diperlukan dalam perencanaan kurikulum.

Selain penentuan tim, juga diperlukan sumber daya pendukung. Pada tahapan ini, sumber daya pendukung bisa dikatakan belum memenuhi secara maksimal. Kemampuan guru juga masih terbatas sehingga diperlukan sumber daya pendukung. Sumber daya fisik mempengaruhi kapasitas dalam implementasi kurikulum. Apabila tidak tersedianya sumber daya atau sumber daya yang tidak memadai dapat membatasi kinerja baik guru maupun peserta didik dalam proses pembelajaran. Faktor guru termasuk latar belakang guru,

ketrampilan guru melalui berbagai pelatihan, komitmen dalam mengajar sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan. Guru mempunyai peran besar dalam implementasi kurikulum yang efektif. Kurangnya pengetahuan materi pelajaran oleh guru dan kurangnya pelatihan yang memadai untuk guru bisa menjadi hambatan utama untuk implementasi kurikulum.

Amirudin (2017), mengungkapkan bahwa beberapa komponen yang harus diorganisir dengan baik di dalam manajemen kurikulum antara lain rencana dan pelaksanaan pembelajaran, pengadaan dan pembinaan tenaga ahli, pendayagunaan lingkungan dan sumber daya masyarakat, serta pengembangan dan penataan kebijakan. Hal yang sama juga disampaikan oleh Colyns dkk., (2017) dalam kajian teorinya mengungkapkan bahwa indikator kapasitas dalam mendukung implementasi kurikulum dikelompokkan menjadi empat. Meliputi sumber daya fisik, faktor guru, faktor pelajar dan etos dan manajemen sekolah. Pengorganisasian kurikulum Pendidikan Pancasila SMA secara umum melalui beberapa tahapan antara lain:

Pertama, Tim pelaksana kurikulum Pendidikan Pancasila; Kepala sekolah atau kepala madrasah memiliki kewenangan didalam menentukan tim perencanaan kurikulum semua mata pelajaran termasuk Pendidikan Pancasila. Adapun proses penentuan tim perencanaan kurikulum Pendidikan Pancasila yaitu kepala sekolah dibantu wakil kepala sekolah membagikan jadwal mengajar dan memberikan tugas kepada guru Pendidikan Pancasila untuk menyusun perencanaan kurikulum Pendidikan Pancasila sesuai jadwal mengajar. Selanjutnya guru Pendidikan Pancasila menyusun rencana kurikulum Pendidikan Pancasila sesuai jadwal mengajar atau kelas yang diampu. Didalam proses penyusunannya, guru Pendidikan Pancasila juga kolaborasi atau bekerjasama dengan guru yang lain baik di sekolah maupun daerah melalui forum musyawarah guru Pendidikan Pancasila.

Selanjutnya apabila sudah selesai, guru mengumpulkannya kepada kepala sekolah untuk dikoreksi terlebih dahulu sebelum dilakukan penandatanganan atau pengesahan dokumen perencanaan kurikulum Pendidikan Pancasila tersebut. Tim pelaksana utama dalam manajemen kurikulum Pendidikan Pancasila adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, dan guru Pendidikan Pancasila sekolah. selanjutnya tim pelaksana pendukung meliputi komunitas musyawarah guru mata pelajaran (MGMP), wali siswa/komite sekolah dan masyarakat. Tim pelaksana utama dan pendukung harus dilibatkan semua, agar memiliki pemahaman dan persepsi yang sama untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Pancasila.

Kedua pembagian tugas; Pembagian tugas kurikulum Pendidikan Pancasila ditentukan oleh kepala sekolah dalam bentuk matrik jadwal mengajar guru Pendidikan Pancasila. Guru membuat perencanaan kurikulum dimasing-masing kelas. Adapun prosesnya adalah pertama pihak sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah mengagendakan rapat membahas perencanaan kurikulum diantaranya adalah pembagian tugas mengajar guru. rapat juga menghadirkan wali siswa atau komite sekolah. Kedua, guru Pendidikan Pancasila menyusun perencanaan kurikulum sesuai jadwal yang sudah diberikan oleh guru yaitu sesuai kelas yang diampu berkolaborasi dengan MGMP, dan juga komite sekolah/wali siswa. Komite sekolah sebagai pelaksana pendukung yaitu memberi masukan terkait pelaksanaan kurikulum Pendidikan Pancasila.

Ketiga, keterkaitan antara komponen; Guru Pendidikan Pancasila didalam menyusun komponen perencanaan kurikulum terlebih dahulu menyusun komponen dasar atau umum terlebih dahulu. Adapun komponen yang disusun adalah program kerja. Program kerja terdiri dari analisis dokumen kurikulum, program tahunan, program semester, silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran dan rencana penilaian. Dalam menyusun komponen program kerja guru berpedoman pada kurikulum nasional. Dalam menyusun rencana kurikulum guru Pendidikan Pancasila juga berkolaborasi dengan guru lain baik di Sekolah maupun tingkat daerah dan juga masyarakat atau wali murid. Guru Pendidikan Pancasila juga berdiskusi dengan pihak sekolah terkait sarana dan prasarana apa saja yang digunakan dalam rencana implementasi kurikulum Pendidikan Pancasila. Selanjutnya Kepala Sekolah menindaklanjuti dan menyusun anggaran untuk pengadaan sarana atau fasilitas khususnya perangkat kurikulum dan pembelajaran. Keterkaitan antara komponen meliputi program tahunan, program semester, silabus, rencana pembelajaran, SDM, dan juga fasilitas atau sarana dan prasarana.

KESIMPULAN

Pengorganisasian kurikulum Pendidikan Pancasila SMA yaitu: (1) proses penentuan tim perencanaan kurikulum Pendidikan Pancasila yaitu kepala sekolah dibantu wakil kepala sekolah membagikan jadwal mengajar dan memberikan tugas kepada guru Pendidikan Pancasila untuk menyusun perencanaan kurikulum Pendidikan Pancasila sesuai jadwal mengajar; (2) proses pembuatan jadwal perencanaan kurikulum Pendidikan Pancasila meliputi: kepala sekolah, wakil kepala sekolah membuat kalender akademik dengan berpedoman pada kalender pendidikan yang diterbitkan oleh dinas pendidikan provinsi untuk

sekolah SMA, kepala sekolah mengagendakan rapat persiapan perencanaan kurikulum mengundang guru mata pelajaran, kepala sekolah mensosialisasikan dan membagikan jadwal mengajar guru; (3) proses pembagian tugas perencanaan kurikulum Pendidikan Pancasila ditentukan oleh kepala sekolah dalam bentuk matrik jadwal mengajar guru Pendidikan Pancasila; (4) proses penentuan sumber daya pendukung perencanaan kurikulum Pendidikan Pancasila yaitu kepala sekolah mengadakan rapat dengan guru membahas berbagai perencanaan terkait kurikulum mata pelajaran antara lain berkaitan tentang sumber daya pendukung, para guru memberi masukan kepada kepala sekolah terkait berbagai komponen sumber daya yang dibutuhkan, kepala sekolah mempertimbangkan berbagai masukan guru, selanjutnya menindaklanjutinya dalam bentuk kebijakan; (5) antara komponen kurikulum Pendidikan Pancasila saling bersinergitas atau saling melengkapi dan berkaitan.

DAFTAR PUSTAKA

- Colyns, Byson et al. (2017). Managing the Implementation of a School Curriculum in Malawi: Challenges and Policy Implications. *Texila International Journal of Management* 3(2): 6–12.
- David L. Grossman, Wing On Lee, Kerry J. Kennedy. (2008). *Citizenship Curriculum In Asia and The Pacific*. China: Comparative Education Research Centre Faculty of Education, The University of Hong Kong.
- Duze, Chinelo O. (2012). The Changing Role of School Leadership and Teacher Capacity Building in Teaching and Learning. *Journal of Emerging Trends in Educational Research and Policy Studies* 3(1): 111–17.
- Enri Rusnaeni, Firman Umar, Andi Aco Agus. (2018). Pelaksanaan Kurikulum 2013 (K13) PPKn Di SMAN 4 Makasar. *Tomalebbi* 5(2): 62–70. <http://ojs.unm.ac.id/tomalebbi/article/view/6792/3891>
- Hidayati, Wiji. Syaefudin. Umi Muslimah. (2021). *Manajemen Kurikulum Dan Program Pendidikan (Konsep Dan Strategi Pengembangan)*.
- Hunkins, P. (2015). Curriculum Theory: Meaning, and Function. *Florida International University*: 103–10.
- I Gede Angga Supriana, Sukadi, I Nengah Suastika. (2020). Efektivitas Implementasi Kurikulum 2013 Mata Pelajaran PPKn Pada SMA Negeri Di Kecamatan Busungbiu. *Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 8(1): 24–34.
- Isa, Che Maznah Mat et al. (2021). Effective Implementation of Complex Engineering Problems and Complex Engineering Activities in Malaysian Engineering Curricular. *Asian Journal of University Education* 17(4): 170–78.
- Kemdikbud. (2003). *Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003*. <http://sdm.data.kemdikbud.go.id/-SNP/dokumen/undang-undang-no-20-tentang-sisdiknas.pdf%5Cntgl.16/12/2015>.
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. (2013). *Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013 Tentang*

Silabus Pembelajaran Sekolah Menengah.

- Murdiono, Mukhamad, and Wuri Wuryandani. (2021). Civic and Nationalism Education for Young Indonesian Generation in the Globalization Era. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 18(1): 158–71.
- Muthiah, Vigneswary, Donnie Adams, and Zuraidah Abdullah. (2021). Teachers' Organizational Commitment in International Schools: Does Distributed Leadership Make a Difference?. *Malaysian Online Journal of Educational Management* 9(2): 1–17.
- Nuryadi dan Tolib. (2017). *Kemdikbud Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Kelas X*. Jakarta: Kemdikbud.
- Pike, J. Mark Halstead and Mark A. (2006). *Citizenship and Moral Education*. 1st ed. New York: Routledge Taylor & Francis Group.
- Revita Mega Saputri, Marzuki. (2021). The Role of Parents and Society in Value Education and Civic Education.” *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 18(2): 268–75.
- Stabback, Philip. (2016). What Makes A Quality Curriculum? *In-Progress Reflection* (2): 1–44.
- Syaputra, Adi, Studi, and Enung Hasanah. (2021). Manajemen Kurikulum Dalam Pembelajaran Jarak Jauh Di Masa Pandemi COVID-19.” *Manajemen Pendidikan* 8(2).
- Syarifah. (2019). Active Learning Teach Like Finland (Sebuah Telaah Kurikulum 2013). *Jurnal Qiro'ah* 9(1): 85–99.
- Ulinniam, Hidayat, Ujang Cepi Barlian, and Yosol Iriantara. (2021). Penerapan Kurikulum Revisi 2013 Di Masa Pandemi Pada SMK IBS Tathmainul Qullub Indramayu.” *Jurnal Pendidikan Indonesia* 2(1): 118–26.
- Utomo, Sandi Aji Wahyu, and Wida Nurul Azizah. (2018). “Analisis Organisasi Kurikulum Dan Struktur Kurikulum Anak Usia Kelas Awal Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI).” *Jurnal PANCAR* 2(1): 19–26.
- Wallis, Tommy and Voltz Teresa. (2015). *Curriculum Management Plan*. North Texas Avenue: Curriculum & Instruction Departement Bryan ISD.
- Winataputra, Udin S. (2016). “Posisi Akademik Pendidikan Kewarganegaraan dan Muatan Pendidikan Pancasila dan Kewargaengaraan dalam Konteks Sistem Pendidikan Nasional. *Jurnal Moral Kemasyarakatan* 1(1): 15–36. <http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JMK/article/view/1184>.